ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA BARAT

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) Pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

NURIZKI YULIZA

18060069/2018

JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama	: Nurizki Yuliza
TM / NIM	: 2018 / 18060069
Jurusan	: Ilmu Ekonomi
Keahlian	: Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan
Fakultas	: Ekonomi

Padang, Oktober 2022

Mengetahui,
Kepala Departemen Ilmu Ekonomi

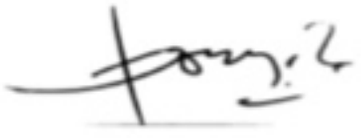

Dr. Novya Zulva Riani, S.E, M.Si
NIP. 19711104 200501 2 001

Disetujui oleh:
Pembimbing

Dr. Zul Azhar, M.Si
NIP. 19590805 198503 1 006

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama	**: Nurizki Yuliza**
TM/NIM	**: 2018 / 18060069**
Jurusan	**: Ilmu Ekonomi**
Keahlian	**: Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan**
Fakultas	**: Ekonomi**

Padang, 30 Agustus 2022

Nomor	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Dr. Zul Azhar, M.Si	
2.	Anggota	Mike Triani, S.E, M.M	
3.	Anggota	Urmatul Uska Akbar, S.E, M.E.	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nurizki Yuliza
NIM/Th. Masuk	: 18060069/2018
Tempat/Tanggal Lahir	: Tanjung Gadang/ 13 Juli 1999
Jurusan	: Ilmu Ekonomi
Keahlian	: Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan
Fakultas	: Ekonomi
Alamat	: Jalan Enggang Raya No.12B
No.HP/Telepon	: 082269609912
Judul Skripsi	: Analisis Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah hasil dan belum pernah di ajukan untuk memperoleh gelar akademik(sarjana) baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. 5Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidsk terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau di publikasikan kecuali tertulis jelas di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini **Sah** apabila telah di tanda tangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran di dalam pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah di peroleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, 10 Oktober 2022

Nurizki Yuliza

NIM 18060069

ABSTRAK

Nurizki Yuliza (18060069) :Analisis Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat. Skripsi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Dibawah Bimbingan Bapak Dr. Zul Azhar, M.Si

Dalam rangka pembangunan daerah, pemerintah pusat menerapkan sistem desentralisasi. Dimana setiap pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam mengatur dan mendistribusikan pendapatan daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal yang diperkenalkan pada tahun 2001 digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengembangkan semua potensi ekonomi yang ada untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Diketahui, selama lima tahun terakhir, yakni 2016 hingga 2020, pertumbuhan ekonomi Sumbar terus melambat, mencapai 5,27% pada 2016 dan selanjutnya negatif 1,62% pada 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2016-2020 pada era desentralisasi fiskal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel (Pooled data) yaitu gabungan dari *cross section* dan *time series.* Yang kemudian dianalisis menggunakan teknik data panel dengan program eviews9. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah OLS (Ordinary Least Square) dengan pendekatan fixed effect atau LSDV (Least Square Dummy Variabel).

Hasil survei menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, DAU, DAK, dan DBH secara simultan semuanya berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara parsial DAU dan DBH memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk PAD, DAK tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumbar, dan DAK berdampak negatif.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi; PAD; DAU; DAK; DBH; OLS

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul " Analisis Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat". Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Srata Satu (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat banyak kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, serta kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga masalah yang dihadapi dapat diatasi dengan baik. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. Zul Azhar, M.Si selaku pembimbing yang telah sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran yang sangat berharga kepada penulis.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Dr. Novya Zulfa Riani, S.E, M.Si selaku Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Bapak Dr. Joan Marta, S.E, M.Si selaku Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Neger Padang yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Zul Azhar, M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi serta materi dan penuh sabar mendengar keluhan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
4. Ibu Mike Triani, S.E, M.M dan Urmatul Uska Akbar, S.E, M.E sebagai dosen penelaah dan penguji, pada jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang yang sudah memberi motivasi, masukan dan arahan terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, pengetahuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi yang telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini.
7. Teristimewa kakek dan almh. nenek saya, kakek Agustar dan nenek Nur Asna, yang telah membesarkan, mendidik, menyayangi serta senantiasa memberikan dukungan yang tiada henti, baik dalam bentuk material maupun immaterial, serta doa-doa yang tak terhingga.

8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Aprijal dan Ibu Sridawati atas segala dukungan, semangat, dan doa-doa selama ini.
9. Keluarga tersayang, makyang Dedi, mami Fitria, maketek Fadil, dan om Andre atas segala bentuk dukungan, doa, dan perhatian yang tulus.
10. Adik-adik ku terkasih, Fadjri, Mutiara, Annesa, Alfi dan Rafka
11. Sahabat-sahabat semasa sekolah caca, seli, puja, pupuk, bea, tekpi, dapit, bang put, bang fik, alm. dandi, tomi, yang selalu memberikan semangat.
12. Sahabat-sahabat selama kuliah, kirana, nunung, mutia, ananda, rahmi, elsi, bunda atas segala bentuk motivasi dan semangat.
13. Teman-teman calon suksesor masa depan dari Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2018 atas pengalaman dan pembelajaran semasa kuliah.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan saran serta kritik yang sifatnya membangun. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhinggakepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal bagi kita semua.

Padang, Agustus 2022
Penulis

Nurizki Yuliza

DAFTAR ISI

ABSTRAK ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI vi
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR TABEL ix
BAB I PENDAHULUAN 10
A. Latar Belakang Masalah 10
B. Rumusan Masalah 17
C. Tujuan Penelitian 17
D. Manfaat Penelitian 18
BAB II .....
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 20
A. Kajian Teori 20
B. Penelitian Terdahulu 36
C. Kerangka Konseptual 38
D. Hipotesis Penelitian 40
BAB III METODE PENELITIAN 42
A. Jenis Penelitian 42
B. Tempat dan Waktu Penelitian 42
C. Jenis dan Sumber Data 43
D. Teknik Pengumpulan Data 44
E. Definisi Operasional Variabel 45
F. Teknis Analisi Data 46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
A. Hasil Penelitian 52
B. Deskripsi Variabel Penelitian 53

C. Analisis Induktif 67
D. Pembahasan 76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 83
A. Kesimpulan 83
B. Saran 84
DAFTAR PUSTAKA 86
LAMPIRAN 88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regiomal Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2020 12

Gambar 1. 2 Realisasi PAD, DAK, DAU dan DBH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2020 14

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual 40

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel..... 45

Tabel 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumaterat BaratTahun 2016-2020..... 54

Tabel 4. 2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Dalam Miliar Rupiah)..... 57

Tabel 4. 3 Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Dalam Miliar Rupiah)..... 60

Tabel 4. 4 Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Dalam Miliar Rupiah)..... 63

Tabel 4. 5 Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Dalam Miliar Rupiah)..... 66

Tabel 4. 6 Hasil uji chow..... 67

Tabel 4. 7 Hasil Uji Hausmant..... 68

Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolinearitas..... 69

Tabel 4. 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas..... 70

Tabel 4. 10 Hasil Estimasi Fixed Effect..... 71

Tabel 4. 11 Hasil Uji F..... 73

Tabel 4. 12 Hasil Uji..... 74

Tabel 4. 13 R2..... 75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di indonesia melalui kebijakan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 32 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan No. 33 Tahun 2004 telah mendapatkan hak wewenang dan kesempatan besar untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan mengurangi campur tangan pemerintah pusat. Artinya dengan adanya otonomi daerah seluruh provinsi dan kabupaten/kota di harapkan mampu berdiri sendiri dan menjalankan kebijakan yang telah di ambilnya guna memaksimalkan potensi daerah sehingga pembangunan di daerah dapat seimbang dengan pembangunan yang ada di pusat. Menurut (Saraswati, 2018) dengan adanya otonomi daerah tentunya akan memacu daerah untuk bisa dan mampu mengelola daerahnya sendiri agar mampu menjadi daerah yang mandiri serta menjadi sumber bagi pembagunan nasional. Rangsangan inilah yang nantinya akan memacu daerah untuk berlomba-lomba dan meningkatkan potensinya masing-masing yang nantinya akan menimbulkan suatu percepatan ekonomi. Maka sudah jelas bahwa otonomi daerah memiiki peran yang sangat penting terhadap pembangunan suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan sebagai proses peningkatan jangka panjang dalam output per kapita. Ini menyoroti tiga aspek. Pertama, pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses. Lebih khusus lagi, ada aspek dinamis dari ekonomi

yang mengembangkan atau mengubah ekonomi dari waktu ke waktu. Kedua, pertumbuhan ekonomi juga dikaitkan dengan peningkatan output per kapita, dan dua dimensi juga harus dipertimbangkan: dimensi output total dan dimensi populasi. Ketiga, gambaran jangka panjang. ekonomi akan tumbuh dalam jangka panjang (Damara, 2021).

Menurut Gustiana (2014) Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu untuk mengukur keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan berbagai indikator, antara lain pertumbuhan ekonomi, perubahan struktural perekonomian, dan tingkat pendapatan per kapita (PDRB). Pertumbuhan ekonomi yang terjadi disebabkan oleh peningkatan berbagai jenis sektor ekonomi yang secara tidak langsung menjelaskan besarnya perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi daerah biasanya diberikan berdasarkan produksi barang dan jasa yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) daerah tersebut.

Adanya perrtumbuhan ekonomi yang berkesinambungan adalah suatu gambaran dari hasil kerja pemerintah baik itu tingat nasional maupun daerah guna mensejahtrakan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan memperbesar kapasitas ekonomi (PDRB- Produk Domesti Regional Bruto).

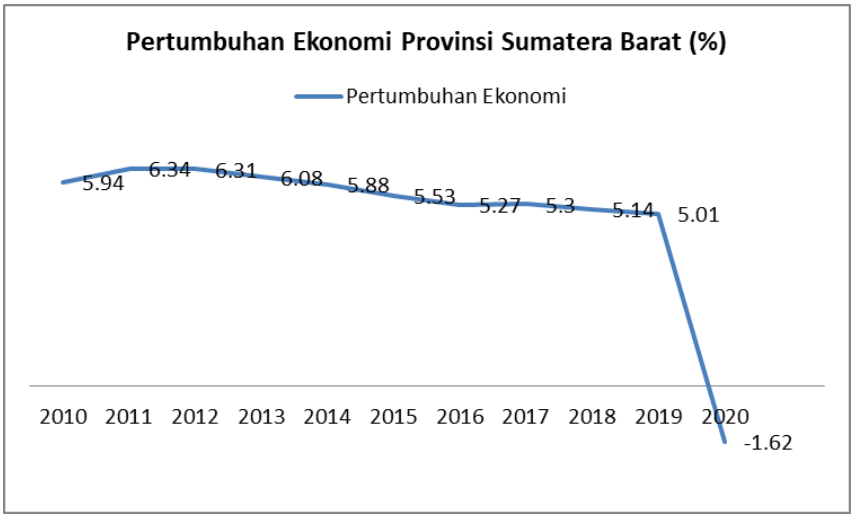

Sumber: Sumbar.bps.go.id 2022 (data diolah)

Gambar 1. 1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regiomal Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2020

Pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat berfluktuasi dari tahun ke tahun dengat tingkat pertumbuhan tertinggi yaitu pada tahun 2011 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6.34%. namun pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi sumatera barat terus-terusan mengalami penurunan. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang terus terjadi di provinsi Sumatera Barat sejalan dengan kondisi ekonomi Nasional yang juga mengalami pertumbuhan melambat mulai dari tahun 2012. Perlambatan ekonomi Sumbar tahun 2019 berasal dari tren penurunan pertumbuhan investasi swasta dan rendahnya permintaan global serta proteksi perdagangan internasional yang berdampak pada kinerja ekspor. Untuk penurunan drastis pada tahun 2020 dengan pertumbuhan ekononi berada pada angka -

1.62%. Faktor utama penyebab anjoklanya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 adalah pandemi Covid-19 yang menyerang negara-negara di dunia.

Tujuan PAD adalah agar pemerintah daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai potensi daerah sebagai wujud desentralisasi (Montolalu, 2017). Peningkatan PAD diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berinvestasi dalam belanja modal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Arini & Kusuma, 2019). Namun, terdapat dua sisi pada evaluasi desentralisasi fiskal. Di satu sisi, desentralisasi keuangan memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya. Namun, desentralisasi fiskal juga menimbulkan masalah baru yang disebabkan oleh perbedaan tingkat cadangan fiskal di berbagai daerah. Permatasari & Mildawati (2016) menemukan bahwa terdapat disparitas yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi antar daerah (kabupaten dan kota) ketika menerapkan desentralisasi fiskal. Hal ini karena daerah dengan potensi keuangan yang lebih besar akan memiliki Sumber Dana Masyarakat (PAD) yang lebih besar dan daerah akan lebih berkembang. Hal ini tentu saja sebaliknya di daerah yang kurang memungkinkan (Santosa & Rofiq, 2013). Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah pusat akan memberikan dukungan finansial berupa dana perimbangan.

Dana Perimbangan adalah kiriman uang pemerintah pusat yang diperoleh dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah yang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi. Menurut Perubahan UU Pemerintah Daerah (UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014) Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana kompensasi pemerintah dan penyalurannya berdimensi pemerataan dan keadilan yang selaras dengan pengelolaan urusan pemerintahan (Nurdiwaty et al., 2017). Keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah meliputi penyaluran keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan, dengan mempertimbangkan kemungkinan, kondisi dan kebutuhan daerah (Budianto & Alexander, 2017). keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu sistem yang komprehensif (Purwantoro & Setyowati, 2019)

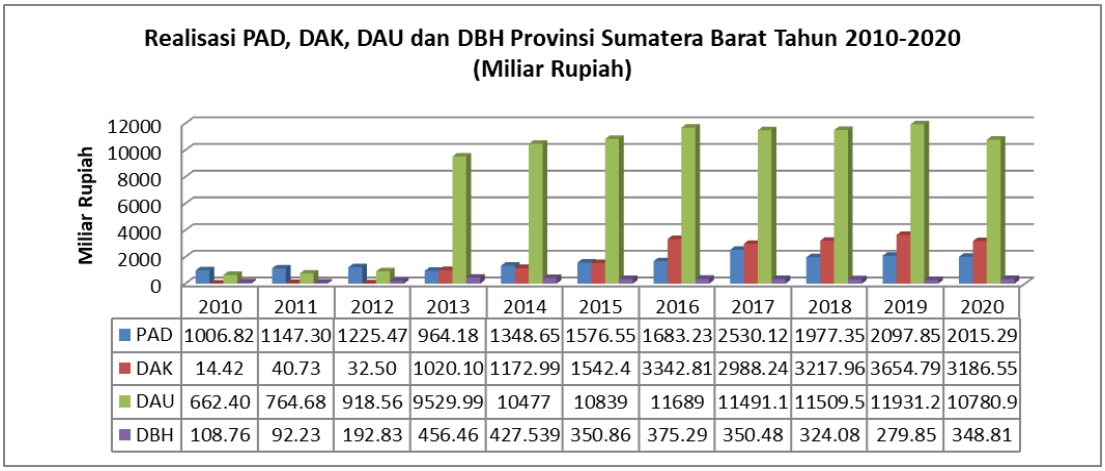

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PAD	1006.82	1147.30	1225.47	964.18	1348.65	1576.55	1683.23	2530.12	1977.35	2097.85	2015.29
DAK	14.42	40.73	32.50	1020.10	1172.99	1542.4	3342.81	2988.24	3217.96	3654.79	3186.55
DAU	662.40	764.68	918.56	9529.99	10477	10839	11689	11491.1	11509.5	11931.2	10780.9
DBH	108.76	92.23	192.83	456.46	427.539	350.86	375.29	350.48	324.08	279.85	348.81

Sumber: Sumbar.bps.go.id 2022 (data diolah)

Gambar 1. 2 Realisasi PAD, DAK, DAU dan DBH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2020

Selama periode 2010 sampai 2019 PAD provinsi Sumatera Barat selalu mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan pemanfaatan potensi daerah semakin optimal dari tahun ke tahun. Dimana sumber pendapatan terbesar untuk PAD

provinsi Sumatera Barat berasal dari pajak. Pada tahun 2020 PAD Provinsi sumatera Barat mengalami penurunan yaitu dari Rp 2.328,43 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 2.251,34 miliar pada tahun 2020. Hal tersebut berhubungan dengan kondisi pandemi Covid-19, dimana Pemerintah provinsi Sumatera Barat melakukan beberapa upaya. Antara lain memberikan keringanan dan kemudahan kepada wajib pajak dalam bentuk pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor. Karena memang pendapatan daerah terbesar bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Untuk DAU dan DAK di provinsi Sumatera Barat meningkat dari tahun ke tahunnya. Dimana DAK hanya mengalami penurunan pada tahun 2012 yaitu Rp 32,50 Miliar dan pada tahun 2017 yaitu Rp 2.988,24 Miliar. Begitu juga dengan DAU yang hanya mengalami penurunan pada tahun 2017 dan tahun 2020. Yaitu Rp 11.491,1 Miliar pada 2017 dan Rp 10.780,9 Miliar pada tahun 2020. Sementara Dana bagi hasil mengalami fluktuasi tapi masih stabil. Hal tersebut menggambarkan bahwa transfer yang di lakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah selalu meningkat dari tahun-tahunnya agar pemerintah daerah bisa menjalankan desentralisasi dengan baik.

Porsi dana perimbangan, khususnya DAU, dalam pendapatan daerah masih paling tinggi dibandingkan dengan pendapatan daerah lainnya, termasuk PAD. Tingginya proporsi dana perimbangan dibandingkan dengan pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa pendapatan daerah sangat tergantung pada dukungan keuangan (transfer) dari pemerintah pusat. Namun, dalam jangka panjang, ketergantungan

semacam ini kemungkinan besar akan berkurang. Idealnya, pelaksanaan otonomi daerah harus mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dan membuat daerah lebih mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendanaan daerah.

Secara umum pendapatan pemerintah yang berupa PAD, DAU, DAK dan DBH mengalami peningkatan tiap tahunnya, sementara untuk pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sendiri cenderung mengalami penurunan mulai tahun 2011. Seharusnya dengan jumlah pendapatan yang terus meningkat dari tahunke tahun nya mampu membawa pertumbuhan ekonomi untuk ikut naik, tapi nyatanya pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat malah cenderung mengalami penurunan.

Mengingat potensi serta kondisi masing-masing daerah yang berbeda-beda menimbulkan konsekuensi akan adanya kesenjangan kemampuan dalam pelaksaan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah, terutama menyangkut masalah pengelolaan sumber-sumber potensi daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda, tidak hanya melanda provinsi Sumatera Barat, tapi juga negara Indonesia dan negara-negara lain di dunia. Yang berdampak besar pada semua aspek kehidupan baik sosial, politik dan dampak yang paling pasti adalah pada perekonomian karena kebijakan *lock down* yang diterapkan. Sehingga peneliti sangat tertarik untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH dalam kaitannya dalam peningkatan kesejateraan masyarakat yang dapat dilihat dari tingkat

pertumbuhan ekonomi. Dari uraian diatas, maka judul penelitian ini adalah "Analisis Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Sejauhmana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat?
2. Sejauhmana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat?
3. Sejauhmana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat?
4. Sejauhmana pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat?
5. Sejauhmana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat?

2. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat?
3. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat?
4. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat?
5. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah serta tujuan penelitian yang sudah ada, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan memperdalam wawasan penulis dalam bidang penelitian ilmiah dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata satu (S1) serta meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya memaksimalkan potensi yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan untuk kemajuan daerah.

3. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menjadi wawasan tentang perkembangan yang ada di daerah, sehingga memungkinkan masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemerintahan daerah.
4. Bagi peneliti lebih lanjut, diharapkan penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan referensi serta menjadi data tambahan bagi para peneliti lain yang juga tertarik pajian dalam bidang ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pertumbuhan Ekomomi

1.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Kemajuan ekonomi dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan yang di tunjukkan oleh output nasional. Pertumbuhan ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi guna mencapaipenambahan output yang dapat di ukur melalui PDB atau PDRB dalam suatu wilayah.

Simon Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, kenaikan pada kemampuan ini disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi, kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya (Todaro & Smith, 2004)

Menurut Taringan (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi (*economic growth)* sederhana nya bisa dimaknai sebagai peningkata output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu yang telah di tentukan. Perekonomian suatu negara dapat dikatakan mengalami

pertumbuhan jika balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya.

Teori Pertumbuhan Endogen (Endogenous Growth) atau dengan kata lain, teori Pertumbuhan Baru (New Growth Theory). Teori pertumbuhan endogen berusaha menjelaskan bahwa sumber-sumber pertumbuhan adalah peningkatan akumulasi modal dalam arti yang luas (Todaro & Smith, 2004). Modal dalam hal ini tidak hanya dalam sifat fisik tetapi juga yang bersifat non-fisik berupa ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Harrord-Domar, investasi adalah kunci pertumbuhan ekonomi, terutama mengingat sifatnya yang ganda. Pertama, investasi dapat menghasilkan pengembalian yang biasa dikenal sebagai efek permintaan. Kedua, investasi dapat meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian dengan meningkatkan persediaan modal. Ini umumnya dikenal sebagai efek pengeluaran. Jadi selama investasi terus berlanjut, pendapatan dan output riil akan terus meningkat. (M.L. Jhingan, 2012)

Menurut teori pertumbuhan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh faktor produksi, akumulasi modal merupakan salah satu faktor produksi, di era desentralisasi fiskal, semua pendapatan daerah akan digunakan sebagai modal lokal. Aktivitas pembelanjaan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang kemudian disebut pertumbuhan ekonomi.

Keberadaan pendapatan daerah sebagai modal di era desentralisasi sejalan dengan teori pertumbuhan yang telah dibahas selama ini, dan dapat dikatakan bahwa pendapatan daerah ini merupakan salah satu faktor produksi yang dimiliki daerah. Ciptakan daerah, produksi dan investasi sehingga produksi dan investasi ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Keynes dalam (Todaro & Smith, 2004) berpendapat bahwa tingkat kegiatan dalam perekonomian ditentukan oleh pembelanjaan agregat. Pada umunya pembelanjaan agregat dam suatu periode tertentu adalah kurang dari pembelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat full employment. Keynes berpendapat sistem pasar bebas tidak akan dapat membuat penyesuaian yang akan menciptakan full employment. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah salah satunya adalah kebiajkan fiskal, kebijakan fiskal melalui pengaturan anggran pengeluaran dan penerimaan pemerintah yang nantinya akan menunjang dalam perekonomian suatu daerah.

Hal ini sejalan dengan pendapat Halim (2014) yang menyatakan bahwa salah satu fungi sektor publik ialah anggran sebagai alat kebijakan fiskal artinya sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah dugunakan untk menstabilkan ekonomi dan mendoronng pertumbuhan ekonomi melalui anggran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah,

sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggran dapat digunakan untk mendorong, menfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegoiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hal in disebabkan karna APBD merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan APBD sebagai pendorong adalah salah satu tercapainya target dan sasarn makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permsalahan pokok yang merupakan tantangan mewujudakn agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

2. Pendapatan Asli Daerah

2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan Peraturan yang ada di Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Halim & Kusufi (2007) menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang di peroleh oleh daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi asli daerah".

Terminilogi pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah setempat yang bersumber dari pembayaran sektor pajak di daerah, retribusi daerah, keuntungan dari hasil perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan milik

daerah yang di pisahkan, serta penerimaan lain-lain yang termasuk kedalam penerimaan daerah yang sah (Mardiasmo, 2021)

Salah satu sumber pembelanjaan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah berpengaruh pada jumlah dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ketika PAD mengalami kenaikan, disaat itu juga pemerintah daerah memiliki dana yang semakin banyak dan selanjutnya juga berpengaruh kemandirian daerah yang juga akan ikut meningkat, dan kesempatan untuk membangun perekonomian oleh pemerintah daerah menjadi semakin tinggi (Tambunan, 2006)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfungsi sebagai sumber pendapatan yang berguna untuk mendukung pembangunan daerah seperti infrastruktur. Pendapatan asli suatu daerah juga digunakan sebagai ukuran kemampuan suatu daerah untuk menggali sumber daya lokal yang ada. Pendapatan daerah juga menjadi tulang punggung pendanaan daerah. Ini merupakan fungsi yang dapat dicapai dengan seberapa besar pendapatan asli daerah dapat memberikan kontribusi terhadap APBD, sehingga semakin tinggi kontribusinya, semakin sedikit dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dari pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah

menjadi tolak ukur ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Apabila jumlah pendapatan asli daerah memberikan konstribusi yang besar pada APBD maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintan pusat akan semakin mengecil.

2.2. Indikator pendapatan asli daerah (PAD)

Menurut Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

a. Hasil Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2009) pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh daerah baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kotamadya yang di pungut berdasarkan peraturan yang ada di daerah masing-masing yang nantinya akan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Berdasrkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang ditujukan kepada orang pribadi maupun suatu badan yang imbalannya berbentuk tidak langsung namun sama, ini tersedia di bawah hukum yang berlaku dan hasilnya digunakan untuk mendanai operasi pemerintah daerah dan pengembangan masyarakat.

b. Hasil Retribusi Daerah

Selain pajak daerah, sumber PAD yang tidak kalah pentingnya adalah retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009, “Pajak Daerah adalah pajak daerah yang memperhitungkan jasa atau izin tertentu yang secara khusus diberikan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum”. Dengan kata lain, retribusi daerah dapat diartikan sebagai pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang secara langsung mengkonsumsi jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang merupakan komponen kekayaan daerah dimana pengelolaannya diserahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kekayaan daerah yang terpisah biasanya dikelola oleh perusahaan milik daerah, yaitu perusahaan terbesar atau seluruh modal/sahamnya dimiliki oleh daerah itu sendiri. Perusahaan ini disebut BUMD, dalam hal ini kekayaan daerah memiliki dua dimensi yang berbeda. (1) pengelolaan kekayaan daerah dilakukan secara tersendiri atas dasar ketentuan yang ada dan berlaku pada perusahaan oleh manajemen BUMD dan (2) pemerintah adalah pemegang saham dan perwakilan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

d. Lain-Lain PAD yang Sah

Jenis pendapatan lain yang sah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam

kategori pajak daerah, pajak daerah, administrasi barang milik daerah dan dirinci menurut subjek pendapatannya. Penjualan uang atau kekayaan masyarakat yang tidak terbagi atas angsuran/angsuran, giro, pendapatan bunga, pendapatan dari pembayaran ganti rugi hak kepada masyarakat, pendapatan dari komisi, rabat atau bentuk lain dari penjualan barang dan jasa oleh masyarakat atau pengadaan. Menerima keuntungan dari selisih kurs Rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, rabat atau bentuk lainnya sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2.3. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan pendapatan yang sumbernya asli dari daerahnya sendiri berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah dapat diukur dengan rumus (Ndede, Sondakh, dan Pontoh, 2016) :

PAD = HPD + RD + Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + LPS

Keterangan :
PAD = Pendapatan asli daerah
HPD = Hasil pajak daerah
RD = Retribusi daerah
LPS = Lain-lain pendapatan yang sah

Jadi dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan penunjang daerah yang digunakan untuk pembangunan di suatu daerah. Hal ini sangat penting untuk kemajuan daerah, adapun

pendapatan yang bisa digunakan untuk pembangunan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil Pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

3. Dana Alokasi Umum

3.1. Pengertian Dana Alokasi Umum

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, "Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang tujuan alokasinya adalah untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam melaksanaan desentralisasi". Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap pemerintah daerah yang ada di Indonesia dengan kurun waktu satu tahun sekali yang mana dananya akan digunakan untuk pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan suatu daerah. Dana Alokasi Umum adalah penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk 30belanja pegawai sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang.

Dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tujuan alokasinya adalah untuk pemerataan kemampuan daerah untuk membiayai pengeluarannya dalam pelaksaan desentralisasi (Halim & Damayanti, 2007)

Berdasarkan Keputusan No. 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan, DAU adalah singkatan dari Pemerataan dan Kecukupan Horisontal. Pemerataan horizontal menguntungkan pemerintah pusat dalam kerangka pemerataan pendapatan yang adil dan merata sehingga tidak terjadi disparitas yang besar antar daerah. Sementara itu, ada kepentingan daerah dalam kecukupan, terutama untuk mengisi kesenjangan anggaran. Berdasarkan Keputusan No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, ditetapkan bahwa besaran DAU ditetapkan paling sedikit 26% dari penerimaan dalam negeri neto yang ditetapkan oleh APBN. Negara Bagian menerima 10% dari DAU yang ditentukan dan Kabupaten/Kota menerima 90%.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan tiap tahun kepada pemerintah daerah yang ada di Indonesia, yang nantinya akan digunakan untuk membangunan daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan daerahnya dalam rangka menjalankan desentralisasi.

3.2. Tahapan Menghitung Dana Alokasi Umum

1. Tahapan Akademis

   Konsep awal pengembangan kebijakan penerapan metode dana alokasi umum adalah tim independen dari

berbagai perguruan tinggi dengan tujuan untuk memperoleh pedoman penghitungan DAU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan karakteristik setempat otonomi Indonesia.

2. Tahapan Administratif

Pada tahap ini Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk perhitungan Dana Alokasi Umum, termasuk kegiatan konsolidasi dan verifikasi data guna mendapatkan data yang valid dan terbaru untuk digunakan dan di siapkan data dasar.

3. Tahapan Teknis

Tahap ini merupakan simulasi perhitungan Dana Alokasi Umum. Hal ini akan dilakukan oleh Pemerintah dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan berdasarkan formula Dana Alokasi Umum yang diamanatkan oleh undang-undang, dengan menggunakan memperhitungkan data yang tersedia dan rekomendasi dari para ilmuwan.

4. Tahapan Politis

Panggung politik adalah tahapan terakhir. Konsultasi dan pembahasan perhitungan pembagian umum antara Pemerintah dan Badan Anggaran Daerah DPR RI Memperoleh persetujuan hasil perhitungan Dana Alokasi Umum.

3.3. Pengukuran Dana Alokasi Umum

UU Nomor 33 Tahun 2004, dana alokasi umum pada daerah provinsi ataupun daerah kabupaten/kota bisa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut

DAU = celah fiskal + alokasi dasar

Keterangan:

Celah Fiskal	= Kebutuhan fiskal – Kapasitas fiskal
Kebutuhan Fiskal	= Total pengeluaran rata-rata (Indeks jumlah penduduk + Indeks wilayah + IPM + Indeks kemahalan konstruksi) + Indeks PDRB per kapita
Kapasitas Fiskal	= PAD + DBH (PBB + BPHTB + PPh + SDA)

4. Dana Alokasi Khusus

4.1. Pengertian Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Umum dan Perimbangan Daerah, dana alokasi khusus (DAK) dinyatakan sebagai dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan

ke daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus akan digunakan untuk menjembatani kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memprioritaskan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, infrastruktur masyarakat, dan lingkungan. Darise (2009) berpendapat bahwa dana alokasi khusus adalah isu regional dan dirancang untuk mendanai kegiatan tertentu di wilayah tertentu yang selaras dengan prioritas nasional guna mendorong percepatan pembangunan daerah.

Menurut Abdul Halim (2007) dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan pada tiap daerah guna mendanai kebutuhan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, DAK merupakan dana yang dialokasikan untuk suatu daerah tertentu dan berasal dari pendapatan APBN. Daerah penerima Dana alokasi khusus (DAK) juga harus menyediakan dana penyesuaian paling sedikit 10% dari jumlah DAK yang ditransfer ke daerah, dan dana penyesuaian tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena tanggung jawab dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dasar telah diserahkan kepada pemerintah negara bagian sesuai dengan prinsip desentralisasi, Dana Alokasi Khusus telah memainkan peran kunci dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah. Drama.

Disimpulakan DAK yaitu dana yang berasal dari APBN yang di distribusikan pada daerah-daerah tertentu guna untuk menopang dana dari kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan bagian program prioritas pada skala nasional yang menjadi beban daerah. Daerah khusus yang yang dimaksud adalah daerah yang memperoleh Dana Alokasi Khusus berdasarkan kriteria yang telah di tentukan, yaitu kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknik.

4.2. Kebijakan Dana Alokasi Khusus

Menurut Kementerian Keuangan, kebijakan dana alokasi khusus bertujuan untuk:

1. Memprioritaskan dukungan untuk wilayah di bawah rata-rata nasional dan mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik untuk pelayanan publik dasar yang menjadi perhatian daerah.

2. Mendukung percepatan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, kawasan perbatasan, kawasan tertinggal/terpencil, kawasan banjir/longsor, kawasan ketahanan pangan dan kawasan pariwisata.

3. Memfasilitasi peningkatan produktivitas, peningkatan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi, terutama di pedesaan, melalui tindakan nyata di bidang pertanian, kelautan, perikanan dan infrastruktur.

4. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, mencegah kerusakan lingkungan, mengurangi risiko bencana melalui kegiatan lingkungan khusus, dan menyediakan layanan infrastruktur dan fasilitas dasar dalam sistem terintegrasi melalui kegiatan infrastruktur khusus, meningkatkan cakupan dan keandalan.

6. Mendukung penyediaan infrastruktur di kabupaten, kota, dan daerah yang terkena pemekaran negara melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur negara.

7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang dibiayai DAK dengan kegiatan yang dibiayai anggaran departemen/lembaga dan kegiatan yang dibiayai APBD.

8. Dana desentralisasi dan pengelolaan bersama yang digunakan untuk membiayai kegiatan daerah secara bertahap dialihkan ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Kesehatan.

4.3. Pengukuran Dana Alokasi Khusus

Jumlah Dana Alokasi Khusus untuk tiap kabupaten/kota berasal dari bobot DAK yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Bobot DAK = Bobot Daerah + Bobot Teknis

Keterangan:

Bobot Daerah = Indeks fiskal dan wilayah × Indeks kemahalan konstruksi

Bobot Teknis = Indeks teknis × Iindek kemahalan konstruksi

5. Dana Bagi Hasil

5.1. Pengertian Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil yaitu dana yang bersumber dari APBN yang pengalokasian pada tiap daerah berdasarkan pada angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, sumber DBH adalah dari pajak serta kekayaan yang dimiliki daerah. Pemerintah menetapkan alokasi DBH dari sumber daya alam sesuai dengan ketentuan dasar perhitungan dan daerah penghasil. Dana Bagi Hasil yang sumbernya dari pajak terdiri dari:

1. Pajak bumi dan bangunan (PBB)
2. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

3. Pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21.

Sedangkan untuk DBH yang sumbernya bersumber dari sumber daya alam terdiri dari (1) Kehutanan (2) Pertambangan umum (3) Perikanan (4) Pertambangan minyak bumi (5) Pertambangan gas bumi (6) Pertambangan panas bumi (Permatasari & Mildawati, 2016).

Berjalannya sistem transfer dalam BDH mencerminkan adannya otonomi yang seluas-luasnnya dalam upaya untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Porsi pembagian dana bagi hasil yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan presentase tertentu, pendapatan APBN yang dibagihasilkan dengan daerah meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh pasal 21, serta DBH yang Bersumber dari Sumber Daya Alam.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian seperti yang dilakukan oleh Meylani M. Arina, Rosalina A.M Koleangan, Daisy S.M. Engka (2019) dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertanda positif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana

Alokasi Khusus (DAK) bertanda negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Lily Kusumawati dan I Gusti Bagus Wiksuana (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali.

Penelitian Lian Arke Mokorowu, Debby Ch. Rotinsulu, Daisy S.M. Engka (2020) berdasarkan hasil penelitian PAD, DAU, DAK,dan DBH secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Minahasa Tenggara. Sedangkan secara parsial hanya DAU yang memiliki berpengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun PAD, DAK dan DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Minahasa Tenggara.

Penelitian Pungky Siswiyanti (2017) mendapatkan hasil bahwa PAD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi tetapi kearah negatif. Dan keseluruhan PAD, DAU DAK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Penelitian Annora Azzahra (2015) berdasarkan hasil penelitian, PAD, DAU, dan DAK secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur. Sedangkan DBH tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan secara simultan PAD, DAU,DAK dan DBH berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur.

Penelitian Maria Sisilia, Harsono (2021) Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAK dan DAU baik secara parsial maupun simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang tahun 2010-2019.

Penelitian Kartika Jannah, Muhammad Nasir (2018) Berdasarkan hasil estimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomisedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sendiri berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan dengan sandar signifikan 0.10 namun variable DAK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan.

C. Kerangka Konseptual

PAD merupakan sumber pendapatan daerah, yang diperoleh dari daerah itu sendiri dan digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi berarti lebih banyak daerah yang dapat memenuhi kebutuhan

pembangunan sektor pelayanan publik, sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat dan investor serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

DAK berperan dalam meningkatkan pembiayaan belanja pemerintah melalui investasi pemerintah daerah. Investasi ini meningkat setiap tahun dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini didukung oleh penelitian Setyawan (2013) yang menunjukkan hubungan positif namun tidak signifikan antara DAK terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan fiskal adalah pemerintah mengalokasikan dana dari APBN untuk mendanai kegiatan daerah dalam rangka otonomi. DAU seharusnya digunakan untuk mendanai belanja langsung, yaitu belanja yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerahnya masing-masing.

DBH digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan keuangan vertikal antara tingkat pemerintahan dengan menyelaraskan kapasitas fiskal pemerintah daerah dengan belanja daerah, dan untuk memfasilitasi pendanaan untuk kegiatan-kegiatan berikut: Ini mempengaruhi perkembangan negara, pembangunan infrastruktur publik dan peningkatan pendapatan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor yang memperngaruhi pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat Selama Priode 2016 sampai 2020. Variabel dependen yang menjadi objek utama dalam

penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi sedangkan yang menjadi variabel Independennya adalah PAD, DAU, DAK, dan DBH. Data yang di gunakan pada penelitian ini berupa data time series dan cross section (data panel) di Provinsi Sumatera Barat selama Priode 2016 sampai 2020.

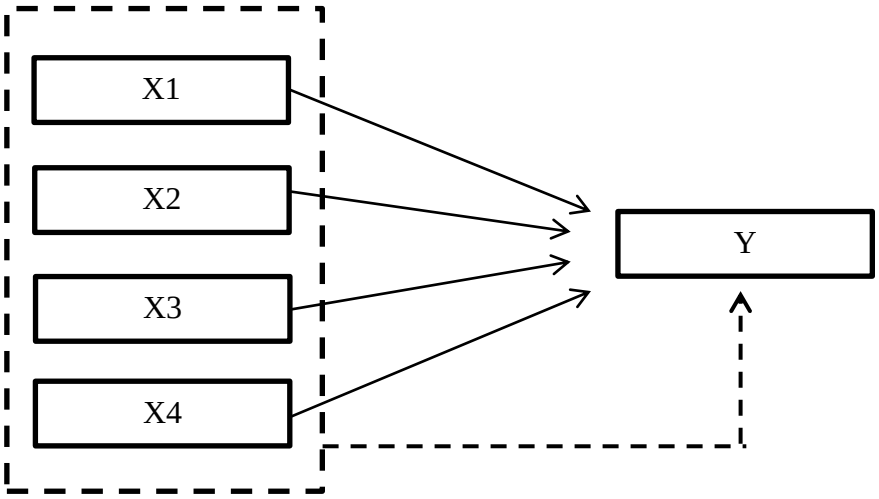

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Keterangan:

⟶	= Berpengaruh secara parsial
- - - →	= Berpengaruh secara simultan
X1	= Pendapatan asli daerah
X2	= Dana alokasi umum
X3	= Dana alokasi khusus
X4	= Dana bagi hasil
Y1	= Pertumbuhan ekonomi

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian, maka akan dikemukakan hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang hendak dibahas melalui penelitian ini.

1. Terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

   $H0 : \beta_1 = 0$

   $Ha : \beta_1 \neq 0$

2. Terdapat pengaruh antara dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi.

   $H0 : \beta_2 = 0$

   $Ha : \beta_2 \neq 0$

3. Terdapat pengaruh antara dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi.

   $H0 : \beta_3 = 0$

   $Ha : \beta_3 \neq 0$

4. Terdapat pengaruh antara dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi.

   $H0 : \beta_4 = 0$

   $Ha : \beta_4 \neq 0$

5. Secara bersama–sama mempunyai pengaruh antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi.

   $H0 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 = 0$

   $Ha : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 \neq 0$

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal di Provinsi Sumatera Barat, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Artinya peningkatan yang terjadi pada PAD tidak ikut membawa kenaikan pada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.
2. Adanya pengaruh yang positif serta signifikan dari Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat, Hal ini berarti apabila Dana Alokasi Umum meningkat maka Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Barat Juga akan ikut meningkat.
3. Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Barat, yang artinya peningkatan pada Dana Alokasi Khusus tidak ikut menaikkan pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat. Dikarenakan DAK yang di alokasikan belum sesuai dengan apa yang

dibutuhkan oleh daerah dan pemabngunannya pun belum mampu memberikan manfaatnya secara maksimal. Sehingga Dana Alokasi Khusus tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Bagi Hasil terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Artinya apabila Dana Bagi Hasil meningkat maka akan ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Barat.
5. Secara bersama-sama PAD, DAU, DAK, BBH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di provinsi Sumatera Barat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan maka saran yang dapat di berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah.
    a. Diharapkan pemerintah di kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat mampu lebih baik baik mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerahnya terutama pada penerimaan pajak serta menemukan sumber-sumber PAD baru, agar pembangunan daerahnya tidak tergantung lagi kepada dana dari pemerintah pusat dan agar nantinya PAD ikut dan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan memanfaatkan Dana Alokasi Khusus yang diterima dari pusat, benar-

benar untuk pembangunan infrastruktur atau sarana-prasarana yang khusus di butuhkan oleh daerah yang bersangkutan, sehingga memang berguna menunjang kehidupan masyarakat yang meninggkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi didaerah tersebut.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini ke arah yang lebih baik lagi dengan melihat inovasi dan strategi yang baik guna mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi dan belanja modal di Sumatera Barat dapat meningkat sampai seterusnya sehingga dapat menyebabkan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Hal yang dapat dilakukan salah satnya dengan memberikan saran-saran yang baik atau ide maupun gagasan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah di provinsi Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Arini, P. R., & Kusuma, M. W. (2019). Pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap investasi swasta di indonesia dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, *5*(1), 28–38.

Budianto, B., & Alexander, S. W. (2017). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *4*(4).

Damara, D. T. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan.

Darise, N. (2009). *Pengelolaan keuangan daerah*.

Gustiana, A. (2014). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Pertmbuhan Ekonomi (studi empiris pada pemerintahan kabupaten soppeng periode 2005-2012). *Skripsi, Universitas Hasanuddin*.

Halim, A. (2014). Manajemen keuangan sektor publik. *Jakarta: Salemba Empat*.

Halim, A., & Damayanti, T. (2007). Pengelolaan keuangan daerah. *Yogyakarta: UPP STIM YKPN*.

M.L. Jhingan. (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (1st ed.). Jakarta :Rajagrafindo Persada.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik.* Yogyakarta : Andi, 2002.

Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.

Montolalu, J. (2017). Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Serta Kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. *JURNAL ADMINISTRASI BISNIS (JAB)*.

Nurdiwaty, D., Zaman, B., & Kristinawati, E. (2017). Analisis pengaruh